

KRITERIA PEMIMPIN IDEAL DALAM HADIS: TELAAH KOMPARATIF PEMIKIRAN AL-MAWARDI, AL-GHAZALI, IBN TAIMIYAH, DAN YUSUF AL-QARADAWI

Ahmad Malikul Aziz¹, Muhammad Nailul Ma'arif²

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga^{1,2}

ahmadmalikulaziz@gmail.com¹, muhammadnailulmaarif@gmail.com²

ARTICLE INFO

Article History

Published : 29 Aug 2026

Keywords:

Hadis Kepemimpinan, Pemimpin Ideal, Amanah, Pemikiran Politik Islam, Legitimasi Kepemimpinan.

Leadership Hadith, Ideal Leader, *Amanah* (Trustworthiness), Islamic Political Thought, Leadership Legitimacy.



© Author(s) 2026
This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ABSTRACT

Kepemimpinan merupakan tema penting dalam ajaran Islam yang terus dikaji seiring perkembangan dinamika sosial dan politik masyarakat Muslim. Perdebatan mengenai kriteria pemimpin ideal menunjukkan bahwa interpretasi terhadap hadis-hadis kepemimpinan berkembang melalui beragam pendekatan dan perspektif keilmuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemimpin ideal dalam hadis, mengkaji pandangan ulama mengenai kepemimpinan, serta menjelaskan relevansinya dalam konteks kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-historis. Data primer diperoleh dari hadis-hadis kepemimpinan dan karya ulama seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Yusuf al-Qaradawi, sedangkan data sekunder berasal dari berbagai buku dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan melalui metode content analysis terhadap konsep dan perkembangan pemikiran kepemimpinan dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amanah, keadilan, tanggung jawab, kompetensi, dan kepedulian sosial merupakan fondasi utama kepemimpinan dalam hadis. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai syarat dan legitimasi kepemimpinan, para ulama sepakat menempatkan nilai-nilai moral sebagai inti kepemimpinan Islam. Penelitian ini juga menemukan pergeseran paradigma legitimasi dari aspek genealogis menuju kapasitas, integritas, dan kemaslahatan publik, yang menunjukkan relevansi prinsip-prinsip kepemimpinan hadis bagi masyarakat Muslim kontemporer.

Leadership is an important theme in Islamic teachings and continues to be studied in response to the evolving social and political dynamics of Muslim societies. Debates concerning the criteria of an ideal leader indicate that the interpretation of leadership-related hadiths has developed through diverse scholarly approaches and perspectives. This study aims to analyze the concept of the ideal leader in hadith, examine scholars' views on leadership, and explain its relevance within contemporary Islamic discourse. This research employs a library research method with a normative-historical approach. Primary data were obtained from leadership-related hadiths and the works of prominent Muslim scholars, including Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, and Yusuf al-Qaradawi, while secondary data were collected from relevant books and scholarly articles. The data were analyzed using content analysis to explore the concepts and development of leadership

thought in Islam. The findings reveal that trustworthiness (amanah), justice, responsibility, competence, and social concern constitute the fundamental principles of leadership in hadith. Although scholars differ regarding the requirements and legitimacy of leadership, they consistently regard moral values as its core foundation. The study also identifies a shift in the paradigm of leadership legitimacy from genealogical considerations toward capacity, integrity, and public welfare (maslahah), demonstrating the continuing relevance of hadith-based leadership principles for contemporary Muslim societies.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan salah satu tema yang selalu menempati posisi penting dalam diskursus Islam. Sejak masa awal Islam, persoalan kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai urusan administratif dan politik, melainkan juga berkaitan dengan tanggung jawab moral, keadilan sosial, serta keberlangsungan kehidupan umat.¹ Dalam tradisi Islam, seorang pemimpin dipandang sebagai pihak yang memikul amanah untuk mengelola kepentingan publik dan memastikan terwujudnya kemaslahatan masyarakat.² Oleh karena itu, pembahasan mengenai kriteria pemimpin tidak pernah terlepas dari sumber-sumber normatif Islam, terutama Al-Qur'an dan hadis.

Dalam konteks Indonesia kontemporer, isu kepemimpinan kembali memperoleh perhatian yang luas seiring menguatnya polarisasi politik dalam berbagai momentum pemilihan umum. Kontestasi politik tidak jarang memperlihatkan munculnya politik identitas yang menjadikan agama, etnis, maupun afiliasi kelompok sebagai instrumen mobilisasi dukungan politik. Akibatnya, perdebatan mengenai siapa yang layak menjadi pemimpin sering kali bergeser dari persoalan kapasitas, integritas, dan kompetensi menuju persoalan identitas kelompok.³ Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kriteria kepemimpinan masih menjadi isu yang diperdebatkan, terutama ketika dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat Muslim Indonesia.

¹ muhammad Harfin Zuhdi, "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam," *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 19, No. 1 (2014): 35–57, International.

² Mauizah Hasanah Simamora Et AL., "Analisis Kriteria Pemimpin Dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tematik Terhadap Ayat-Ayat Tentang Pemimpin Ideal," *Ibn Abbas* 7, No. 2 (2024): 208–26, <https://doi.org/10.51900/Ias.V7i2.22897>.

³ Fitrah Noho, "Moralitas Politik Dan Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Legislatif Di Indonesia Pasca Pemilu 2024": Political Morality And The Crisis Of Public Trust In Legislative Institutions In Indonesia After The 2024 Elections," *Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik* 12, No. 2 (2024): 45–51, <https://doi.org/10.66475/Fisip.V12i2.1196>.

Di sisi lain, berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap sebagian elite politik turut memperlihatkan adanya krisis kepemimpinan yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga moral.⁴ Persoalan tersebut mendorong perlunya peninjauan kembali terhadap konsep kepemimpinan ideal yang diajarkan dalam Islam. Dalam hal ini, hadis memiliki posisi penting karena memuat sejumlah prinsip yang berkaitan dengan tanggung jawab pemimpin, amanah, keadilan, kompetensi, serta hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya. Berbagai hadis tentang kepemimpinan tidak hanya memberikan pedoman normatif, tetapi juga menawarkan landasan etis yang dapat digunakan untuk menilai kualitas seorang pemimpin dalam berbagai konteks sosial dan politik.⁵

Kajian mengenai kepemimpinan Islam sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Wely Dozan dan Qohar al-Basir misalnya, mengkaji karakter pemimpin ideal dalam perspektif Al-Qur'an dan menekankan pentingnya integritas moral, keadilan, serta tanggung jawab sosial sebagai fondasi kepemimpinan Islam.⁶ Sementara itu, Khoirul Anam Siddeh menelaah hadis-hadis tentang keadilan pemimpin dan menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip sentral yang menentukan legitimasi moral seorang pemimpin dalam Islam.⁷

Kajian lain berkembang pada isu-isu yang lebih spesifik, khususnya mengenai kepemimpinan perempuan. Mubarak menelaah hadis-hadis yang sering dijadikan dasar perdebatan tentang kepemimpinan perempuan dan menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara pembacaan tekstual dan kontekstual terhadap hadis tersebut.⁸ Senada dengan itu, Mufarikhin membandingkan pandangan M. Quraish Shihab dan KH. Husein Muhammad mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam serta menemukan bahwa interpretasi kontemporer cenderung memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi perempuan dalam kepemimpinan publik.⁹ Kajian mengenai kepemimpinan perempuan juga dilakukan oleh Nailus

⁴ Dwiki Nur Halimi Et AL., "Transformasi Nilai-Nilai Spiritual Ibnu 'Arabi Dalam Kitab Al-Futūḥāt Al-Makkiyyah Pada Kehidupan Kontemporer," *RIGGS: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business* 4, No. 4 (2026): 9513–19, <https://doi.org/10.31004/Riggs.V4i4.4809>.

⁵ Mulawardani Hasrul And Sahrani, "Krisis Integritas Kepemimpinan: Analisis Etika Manajerial Dalam Industri Perbankan Syariah Modern," *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan (Islamic Science)* 3, No. 4 (2025): 82–105, <https://doi.org/10.35905/Sipakainge.V3i4.14135>.

⁶ Wely Dozan And Qohar Al Basir, "Pemimpin Ideal Perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Ayat-Ayat Kepemimpinan," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 4, No. 1 (2021): 54–66, <https://doi.org/10.35132/Albayan.V4i1.102>.

⁷ Khoirul Anam Siddeh, "Keadilan Dalam Perspektif Hadis: Analisis Teks Hadis Tentang Keadilan Seorang Pemimpin," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 4, No. 2 (2021): 174–86, <https://doi.org/10.35132/Albayan.V4i2.129>.

⁸ Ramdanil Mubarak, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Perspektif Hadits Sebagai Sumber Rujukan," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 6, No. 2 (2023): 292–311, <https://doi.org/10.35132/Albayan.V6i2.154>.

⁹ M. Mufarikhin And S. M. Dewi, "Kepemimpinan Perempuan Muslim Dalam Diskursus Pemikiran Kontemporer," *POLITEA: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 4, No. 1 (2021): 55–72, <https://doi.org/10.21043/Politea.V3i2.8844>.

Saadah dan Umma Farida yang meneliti pemahaman hadis kepemimpinan perempuan dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pemaknaan hadis sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan metodologi penafsiran yang digunakan.¹⁰

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian tentang kepemimpinan Islam telah berkembang dalam berbagai arah, mulai dari kepemimpinan ideal, kepemimpinan perempuan, hingga kepemimpinan non-Muslim. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaji konstruksi kriteria pemimpin berdasarkan hadis, kemudian mengkomparasikannya dengan interpretasi ulama klasik dan relevansinya dalam pandangan Islam. Pembahasan ini masih relatif terbatas, padahal pemahaman ini memiliki kontribusi yang cukup berpengaruh dalam membentuk persepsi masyarakat Muslim terhadap kepemimpinan dan politik kebangsaan.

Melihat uraian latar belakang dan telaah penelitian terdahulu, kajian mengenai kepemimpinan dalam Islam masih menyisakan sejumlah persoalan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana konsep pemimpin ideal yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi, bagaimana para ulama menafsirkan hadis-hadis tersebut dalam berbagai konteks sosial dan historis, serta sejauh mana konsep kepemimpinan yang dibangun oleh hadis memiliki relevansi dengan pandangan Islam di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya diskursus kepemimpinan Islam sekaligus menawarkan kerangka etis yang dapat digunakan untuk memahami persoalan kepemimpinan dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada kajian hadis-hadis tentang kepemimpinan dalam Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis deskriptif-kritis untuk memahami konsep kepemimpinan yang termuat dalam hadis Nabi serta interpretasinya dalam khazanah pemikiran Islam. Data primer penelitian ini bersumber dari kitab-kitab hadis, khususnya hadis-hadis yang berkaitan dengan amanah, keadilan, tanggung jawab, kompetensi, dan kriteria pemimpin ideal. Adapun data sekunder diperoleh dari kitab syarah hadis, karya-karya ulama klasik dan kontemporer, serta artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan tema kepemimpinan dalam Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri literatur yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode *content analysis* (analisis isi), yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema

¹⁰ "Nailus Saadah Dan Umma Farida - Google Scholar," Accessed June 4, 2026, https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Nailus+Saadah+Dan+Umma+Farida+&btnG=.

pokok yang terkandung dalam hadis-hadis kepemimpinan, kemudian membandingkannya dengan pandangan para ulama mengenai kriteria pemimpin ideal. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan kandungan hadis, tetapi juga berupaya menjelaskan relevansinya dalam diskursus kepemimpinan Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan merupakan salah satu konsep fundamental dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan pengelolaan kehidupan individu maupun masyarakat. Meskipun Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan definisi tunggal mengenai kepemimpinan, berbagai istilah yang digunakan dalam sumber-sumber Islam menunjukkan adanya konsep yang komprehensif mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab seorang pemimpin.¹¹ Dalam literatur Islam, konsep kepemimpinan sering dikaitkan dengan istilah *imam*, *khalifah*, *ulil amri*, dan *ri'ayah*. Masing-masing istilah tersebut memiliki konteks penggunaan yang berbeda, tetapi secara substansial mengandung makna tentang tanggung jawab mengatur, membimbing, dan menjaga kemaslahatan umat.¹²

Istilah *imam* berasal dari kata *amma-yaummu* yang berarti memimpin atau berada di depan. Dalam perkembangannya, istilah ini tidak hanya digunakan untuk pemimpin salat, tetapi juga merujuk kepada pemimpin masyarakat secara umum. Al-Qur'an menggunakan istilah ini untuk menggambarkan sosok yang menjadi panutan dan teladan bagi umat manusia, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah [2]: 124 ketika Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai imam bagi manusia.¹³ Dalam konteks hadis, konsep *imam* sering dikaitkan dengan figur yang memiliki tanggung jawab mengarahkan dan menjaga urusan masyarakat. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam Islam tidak semata-mata dipahami sebagai kekuasaan, melainkan sebagai amanah yang menuntut kemampuan membimbing dan memberikan keteladanan.¹⁴

Istilah tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam merupakan konsep yang multidimensional. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut memiliki otoritas untuk mengatur, tetapi juga harus mampu menjadi teladan, menjaga amanah, menegakkan keadilan, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pihak yang dipimpinnya. Pemahaman ini menjadi

¹¹ Budi Suhartawan, "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Al-Qur'an," *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, No. 01 (2021): 1–23, <https://doi.org/10.62359/Tafakkur.V2i1.45>.

¹² Abdul Hamid Et Al., "Konsep Ulil Amri Menurut Muhammad Quraish Shihab Dan Implementasi Kepemimpinan Pada Masa Sekarang" (Undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024), <https://e-theses.iaincurup.ac.id/6588/>.

¹³ Siti Urlan Agustina, "Khalifah, Amir Al-Mukmin, Imam, Ra'in: Tinjauan Bahasa Dan Istilah Dalam Pengembangan Kepemimpinan Pendidikan Islam," *Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan Dan Keguruan* 2, No. 2 (2025): 511–22, <https://doi.org/10.63424/Ahsanitaqwim.V2i2.298>.

¹⁴ Muhammad Ilyas And Nur Rahmah, "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Siyasa: Urgensi, Ketaatan Dan Kriteria Pemimpin," *Equality: Law And Social* 1, No. 1 (2025): 1–11.

landasan penting dalam menelaah hadis-hadis tentang kepemimpinan dan merumuskan kriteria pemimpin ideal sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad saw.

Hadis-Hadis tentang Kepemimpinan

Hadis merupakan salah satu sumber utama ajaran Islam yang memberikan penjelasan lebih rinci mengenai konsep kepemimpinan. Berbeda dengan Al-Qur'an yang umumnya menjelaskan prinsip-prinsip kepemimpinan secara universal, hadis menghadirkan petunjuk yang lebih konkret mengenai karakter, tanggung jawab, dan etika yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.¹⁵ Berbagai hadis Nabi menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak dipahami sebagai sarana memperoleh kehormatan atau kekuasaan semata, melainkan sebagai amanah yang mengandung konsekuensi moral dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.

Salah satu hadis yang paling sering dijadikan dasar dalam pembahasan kepemimpinan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ
رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ مَسْئُولٌ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ
عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ
أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Abdullah ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggung jawabannya. Dan seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggung jawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya” (H.R. Bukhari 4789).¹⁶

¹⁵ Mohammad Fajar Amertha And Dedy Pradesa, “Menggali Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Islam: Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis,” *INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 6, No. 1 (2024): 209–30, <https://doi.org/10.55372/Inteleksiajpid.V6i1.301>.

¹⁶ Muḥammad Ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ṭawq Al-Najāh, 1422 H).

Hadis tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam memiliki cakupan yang luas. Kepemimpinan tidak hanya melekat pada kepala negara atau pejabat pemerintahan, tetapi juga pada setiap individu sesuai dengan ruang tanggung jawabnya masing-masing. Seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap keluarganya, seorang pemimpin masyarakat bertanggung jawab terhadap rakyatnya, dan setiap individu bertanggung jawab atas amanah yang berada dalam lingkup kewenangannya. Dengan demikian, hadis ini menempatkan tanggung jawab (*responsibility*) sebagai inti dari konsep kepemimpinan Islam.

Selain menekankan aspek tanggung jawab, Nabi Muhammad saw. juga memberikan perhatian terhadap pentingnya kompetensi dalam kepemimpinan. Hal tersebut tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ
أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِي فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ
فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ أَرَاهُ
السَّائِلُ عَنْ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا ضَيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِصَاعَتُهَا قَالَ
إِذَا وَسَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya; “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan berkata: telah menceritakan kepada kami Fulaih. Dan telah diriwayatkan pula hadits serupa dari jalan lain, yaitu Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fulaih berkata: telah menceritakan kepadaku bapakku berkata: telah menceritakan kepadaku Hilal bin Ali dari Atho' bin Yasar dari Abu Hurairah berkata: Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berada dalam suatu majelis membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui lalu bertanya: "Kapan datangnya hari kiamat?" Namun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu sebagian kaum ada yang berkata: "Beliau mendengar perkataannya akan tetapi beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu." dan ada pula sebagian yang mengatakan: "Bahkan beliau tidak mendengar perkataannya." Hingga akhirnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyelesaikan pembicaraannya, seraya berkata: "Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi?" Orang itu berkata: "Saya wahai Rasulullah." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila sudah hilang amanah maka tunggulah terjadinya kiamat." Orang itu bertanya:

"Bagaimana hilangnya amanah itu?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat" (H.R. Bukhari 57).¹⁷

Hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan harus diberikan kepada individu yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang sesuai dengan tugas yang diemban. Penempatan seseorang pada posisi kepemimpinan tanpa mempertimbangkan kompetensi dipandang sebagai bentuk pengabaian amanah yang dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keahlian dan profesionalitas merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem kepemimpinan Islam.

Prinsip lain yang juga mendapat perhatian dalam hadis adalah larangan ambisi berlebihan terhadap jabatan. Rasulullah saw. pernah berpesan kepada Abdurrahman bin Samurah:

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ سُمْرَةَ قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سُمْرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيَتْهَا
عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكُنْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أَعْنَتْ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا
خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Muhammad bin Fadhl telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim telah menceritakan kepada kami Al Hasan telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Samurah mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai Abdurrahman bin Samurah, Janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika engkau diberi (jabatan) karena meminta, kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu diberi dengan tidak meminta, kamu akan ditolong, dan jika kamu melakukan sumpah, kemudian kamu melihat suatu yang lebih baik, bayarlah kaffarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik" (H.R. Bukhari 6132).¹⁸

Hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukanlah sesuatu yang harus dikejar demi kepentingan pribadi. Seorang pemimpin ideal dalam Islam adalah mereka yang memandang jabatan sebagai amanah, bukan sebagai sarana memperoleh keuntungan, popularitas, atau kekuasaan. Larangan tersebut juga mencerminkan kehati-hatian Islam terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan yang lahir dari ambisi politik yang tidak terkendali.

¹⁷ Ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*.

¹⁸ Ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*.

Di samping itu, hadis Nabi juga menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang mencintai rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya. Sebaliknya, pemimpin yang dibenci oleh rakyat dan membenci rakyatnya digolongkan sebagai pemimpin yang buruk. Hadis ini menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bertumpu pada aspek formal, tetapi juga pada kemampuan pemimpin membangun kepercayaan dan kedekatan dengan masyarakat.

Berbagai hadis tersebut memperlihatkan bahwa kepemimpinan dalam Islam dibangun di atas sejumlah prinsip mendasar, yaitu amanah, tanggung jawab, kompetensi, keadilan, serta orientasi pada kemaslahatan masyarakat. Prinsip-prinsip inilah yang kemudian menjadi dasar bagi para ulama dalam merumuskan kriteria pemimpin ideal dan mengembangkan teori-teori kepemimpinan dalam tradisi politik Islam.

Kriteria Pemimpin Ideal dalam Perspektif Hadis Hasil sintesis hadis.

Konsep kepemimpinan yang tercermin dalam istilah *imam*, *khalifah*, *ulil amri*, dan *ri'ayah* menunjukkan bahwa Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah yang mengandung dimensi moral, sosial, dan spiritual sekaligus.¹⁹ Namun, pemahaman terhadap konsep tersebut belum lengkap tanpa menelaah nilai-nilai yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dalam konteks ini, hadis Nabi Muhammad saw. memberikan penjelasan yang lebih operasional mengenai karakter dan kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Melalui berbagai hadis tentang kepemimpinan, dapat diidentifikasi sejumlah prinsip fundamental yang menjadi ukuran idealitas seorang pemimpin dalam Islam, yaitu amanah, tanggung jawab, kompetensi, keadilan, dan kepedulian terhadap rakyat. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya membentuk kerangka etis kepemimpinan Islam, tetapi juga menjadi landasan bagi para ulama dalam merumuskan kriteria pemimpin yang ideal.

1. Amanah sebagai Fondasi Kepemimpinan

Dalam perspektif Islam, amanah merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar legitimasi kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak hanya dipandang sebagai pemegang kekuasaan, tetapi juga sebagai pihak yang menerima titipan tanggung jawab dari Allah dan masyarakat yang dipimpinnya.²⁰ Karena itu, kepemimpinan bukanlah hak yang dapat digunakan sesuka hati, melainkan amanah yang harus dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab.

¹⁹ Simamora Et Al., "Analisis Kriteria Pemimpin Dalam Perspektif Al-Qur'an."

²⁰ Nasya Zahirah Almas, "Amanah Dalam Q.S An-Nisa Ayat 58 Dan Relevansinya Terhadap Krisis Kepemimpinan Di Indonesia" (Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), [Http://etheses.uin-malang.ac.id/79972/](http://etheses.uin-malang.ac.id/79972/).

Urgensi amanah dalam kepemimpinan tercermin dalam sabda Nabi Muhammad saw.: "Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya." (HR. al-Bukhari dan Muslim). Hadis tersebut menunjukkan bahwa amanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kepemimpinan Islam. Penyalahgunaan kekuasaan, pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat, maupun tindakan yang merugikan masyarakat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap amanah yang diberikan Allah. Dalam konteks yang lebih luas, amanah tidak hanya berkaitan dengan kejujuran dalam mengelola kekuasaan, tetapi juga mencakup komitmen untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Dengan demikian, amanah dapat dipahami sebagai fondasi utama yang menopang seluruh aspek kepemimpinan. Tanpa adanya amanah, kekuasaan berpotensi berubah menjadi instrumen penindasan dan penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam.

2. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Pemimpin

Selain amanah, hadis Nabi juga menempatkan tanggung jawab sebagai unsur utama dalam kepemimpinan. Konsep ini tercermin dalam hadis yang sangat populer: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. al-Bukhari dan Muslim). Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk kepemimpinan selalu diikuti oleh pertanggungjawaban. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab di hadapan masyarakat, tetapi juga di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, jabatan dalam Islam tidak dipandang sebagai simbol kehormatan semata, melainkan sebagai beban moral yang harus dipertanggungjawabkan.²¹ Dalam konteks pemerintahan, prinsip ini mengandung makna bahwa seluruh kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemimpin harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Pemimpin dituntut untuk memiliki kesadaran bahwa setiap tindakan yang dilakukan selama masa kepemimpinannya akan menjadi bagian dari pertanggungjawaban di akhirat. Kesadaran inilah yang membedakan konsep kepemimpinan Islam dari model kepemimpinan yang hanya berorientasi pada kekuasaan dan keuntungan politik.

3. Kompetensi dan Profesionalitas

Islam tidak hanya menekankan aspek moral dalam kepemimpinan, tetapi juga menaruh perhatian besar terhadap kompetensi dan profesionalitas. Kepemimpinan yang baik memerlukan kemampuan, pengetahuan, dan kecakapan yang memadai agar berbagai urusan masyarakat dapat

²¹ Tri Yugo M.Pd S. Pd, *Trust Leadership : 5 Pilar Kepemimpinan Profetik* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2026).

dikelola secara efektif.²² Prinsip tersebut tergambar dalam hadis Nabi: "Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran." (HR. al-Bukhari).

Hadis ini menunjukkan bahwa penempatan seseorang pada jabatan tertentu harus mempertimbangkan kapasitas dan kompetensinya. Kepemimpinan yang diberikan kepada individu yang tidak memiliki kemampuan akan berpotensi menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, Islam menolak praktik pengangkatan pemimpin yang hanya didasarkan pada kedekatan personal, hubungan kekerabatan, atau pertimbangan non-profesional lainnya. Dalam konteks modern, kompetensi dapat dipahami sebagai kemampuan manajerial, kapasitas intelektual, keterampilan komunikasi, serta kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Dengan demikian, profesionalitas merupakan syarat penting yang harus berjalan beriringan dengan integritas moral dalam diri seorang pemimpin.

4. Keadilan sebagai Prinsip Kepemimpinan

Keadilan merupakan salah satu nilai yang paling sering dikaitkan dengan kepemimpinan dalam Islam. Banyak ayat Al-Qur'an maupun hadis yang menempatkan keadilan sebagai ukuran keberhasilan seorang pemimpin. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa salah satu golongan yang memperoleh naungan Allah pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil.²³ Hadis tersebut menunjukkan bahwa keadilan bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan nilai spiritual yang memiliki konsekuensi religius. Seorang pemimpin dituntut untuk memperlakukan seluruh masyarakat secara proporsional tanpa membedakan latar belakang suku, golongan, status sosial, maupun kedekatan politik. Keadilan juga mengharuskan pemimpin menegakkan hukum secara objektif dan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu. Dalam tradisi politik Islam, keadilan bahkan dipandang sebagai tujuan utama pemerintahan. Karena itu, banyak ulama menempatkan sifat adil sebagai syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Tanpa keadilan, legitimasi moral kepemimpinan akan kehilangan maknanya karena kekuasaan tidak lagi berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan publik.

5. Kepedulian terhadap Rakyat

Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pengelolaan kekuasaan, tetapi juga menekankan kedekatan pemimpin dengan masyarakat yang dipimpinnya. Seorang pemimpin ideal adalah mereka yang memahami kebutuhan rakyat, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta berupaya menghadirkan kebijakan yang membawa manfaat bagi kehidupan bersama. Prinsip

²² "Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Tadbiruna* 4, No. 2 (2025): 304–18, <https://doi.org/10.51192/jurnalmanajemenpendidikanislam.V4i2.1505>.

²³ Fauzi Almubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam," *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 1, No. 2 (2018): 115–43.

tersebut tercermin dalam sabda Nabi Muhammad saw.: "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian; kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian." (HR. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemimpin dan rakyat seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan, kasih sayang, dan kerja sama yang saling menguatkan. Keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kemampuannya menjalankan pemerintahan, tetapi juga dari kemampuannya membangun kedekatan emosional dengan masyarakat.²⁴ Dalam perspektif hadis, pemimpin yang baik bukanlah sosok yang menjaga jarak dari rakyat atau menggunakan kekuasaan untuk mempertahankan privilese pribadi. Sebaliknya, pemimpin ideal adalah mereka yang hadir di tengah masyarakat, memahami persoalan yang dihadapi rakyat, serta menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, kepedulian terhadap rakyat menjadi salah satu indikator penting yang menentukan kualitas kepemimpinan dalam Islam.

Interpretasi Ulama terhadap Hadis Kepemimpinan

1. Al-Mawardi: Kepemimpinan sebagai Penjaga Agama dan Negara

Pembahasan kepemimpinan dalam tradisi politik Islam klasik tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Al-Mawardi (w. 450 H/1058 M). Dalam karya monumentalnya, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, ia mendefinisikan imamah sebagai institusi yang berfungsi menggantikan peran kenabian dalam menjaga agama (*hirasat al-din*) dan mengatur urusan dunia (*siyasat al-dunya*).²⁵ Definisi tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya memiliki dimensi politik, tetapi juga dimensi religius yang bertujuan memastikan keberlangsungan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat.

Dalam merumuskan kriteria pemimpin, Al-Mawardi menempatkan keadilan sebagai syarat utama. Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki integritas moral yang tercermin dalam ketaatan beragama, kemampuan mengendalikan hawa nafsu, dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan. Selain itu, ia juga mensyaratkan kemampuan intelektual yang memadai agar seorang pemimpin mampu mengambil keputusan hukum dan politik secara tepat. Di samping syarat-syarat tersebut, Al-Mawardi masih mempertahankan syarat nasab Quraisy yang didasarkan pada sejumlah hadis mengenai kepemimpinan Quraisy yang berkembang dalam tradisi politik Islam klasik. Pandangan Al-Mawardi lahir dalam konteks politik Dinasti Abbasiyah yang sedang

²⁴ Agung Arif Hakim Batubara Et Al., "Etika Kepemimpinan Dalam Pendidikan Islam: Teladan Nabi Sebagai Fondasi Integritas Pemimpin Modern," *EDU SOCIETY: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, No. 2 (2025): 826–33, <https://doi.org/10.56832/Edu.V5i2.1369>.

²⁵ Danang Permadi And Kotimah, "Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis Pemikiran Al-Mawardi)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2023): 10–17.

mengalami fragmentasi kekuasaan.²⁶ Oleh karena itu, pemikirannya banyak diarahkan untuk mempertahankan legitimasi institusi kekhalifahan sebagai simbol persatuan umat Islam.

2. Al-Ghazali: Kepemimpinan sebagai Instrumen Menjaga Keteraturan Sosial

Berbeda dengan Al-Mawardi yang menekankan aspek kelembagaan politik, Al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) dalam beberapa karyanya, terutama *Al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk* dan *Ihya' Ulum al-Din*, lebih menyoroti dimensi moral dan etika kepemimpinan. Dalam pandangannya, keberadaan pemimpin merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia karena tanpa kepemimpinan masyarakat akan terjerumus ke dalam kekacauan (*fitnah*) dan konflik sosial.²⁷ Dalam karya-karya tersebut, Al-Ghazali menempatkan kepemimpinan sebagai kebutuhan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan agama dan kehidupan masyarakat. Menurutnya, agama dan kekuasaan merupakan dua unsur yang saling menopang; agama menjadi fondasi moral, sedangkan kekuasaan berfungsi menjaga keteraturan sosial.

Al-Ghazali menempatkan keadilan sebagai inti dari kepemimpinan. Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah, rendah hati, mampu menerima nasihat para ulama, serta mendahulukan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Ia juga menekankan pentingnya kesederhanaan dan pengendalian diri sebagai bagian dari etika kepemimpinan Islam.²⁸ Meskipun hidup setelah Al-Mawardi, Al-Ghazali tetap mempertahankan pandangan klasik mengenai pentingnya keturunan Quraisy sebagai salah satu syarat ideal kepemimpinan. Namun demikian, fokus utama pemikirannya bukan terletak pada aspek genealogis, melainkan pada kualitas moral pemimpin yang menentukan keberhasilan pemerintahan.

3. Ibn Taimiyah: Kompetensi dan Amanah sebagai Dasar Kepemimpinan

Pemikiran Ibn Taymiyyah (w. 728 H/1328 M) membawa nuansa yang berbeda dalam diskursus kepemimpinan Islam. Dalam karyanya *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, ia menegaskan bahwa tujuan utama kepemimpinan adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan masyarakat.²⁹ Menurut Ibn Taimiyah, dua prinsip yang paling penting dalam kepemimpinan adalah *al-quwwah* (kompetensi) dan *al-amanah* (integritas). Ia mendasarkan pandangannya pada QS. al-Qashash [28]: 26 yang menyebutkan bahwa orang terbaik untuk diberi tugas adalah mereka yang kuat dan terpercaya. Oleh karena itu, jabatan harus diberikan kepada

²⁶ Ryzka Dwi Kurnia, "Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Mawardi," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 6, No. 1 (2019): 72–89, <https://doi.org/10.32505/Politica.V6i1.2728>.

²⁷ Abû Hâmid Muhammad Al-Ghazâlî, *Al-Tibr Al-Masbûk Fî-Nasîhat Al-Mulûk* (Al-Mu'assasa Al-Jâmi'iyya Lil-Dirâsât Wa-L-Nachr Wa-L-Tawzî', 1987).

²⁸ Al-Ghazâlî, *Al-Tibr Al-Masbûk Fî-Nasîhat Al-Mulûk*.

²⁹ M. Suharti, "Al-Siyasah Al-Syar'iyyah 'Inda Ibn Taimiyah," *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 2 (2015): 25–42.

individu yang memiliki kemampuan dan integritas, bukan semata-mata berdasarkan garis keturunan atau status sosial.³⁰ Penekanan terhadap kompetensi menunjukkan adanya pergeseran fokus dari legitimasi genealogis menuju efektivitas kepemimpinan. Bagi Ibn Taimiyah, pemimpin yang adil dan kompeten lebih layak dipilih dibandingkan pemimpin yang memiliki nasab terhormat tetapi tidak mampu menjalankan amanahnya dengan baik.

4. Yusuf al-Qaradawi: Kepemimpinan dalam Konteks Negara Modern

Pemikiran Yusuf al-Qaradawi merepresentasikan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap persoalan kepemimpinan. Dalam berbagai karyanya tentang fikih politik Islam, seperti *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*,³¹ *Fiqh al-Awlawiyyat*, dan *Min Ajli Shahwah Rashidah Tujaddid al-Din wa Tanhad bi al-Dunya*. Al-Qaradawi dalam karya-karya tersebut, beliau berupaya merekonstruksi pemikiran politik Islam agar tetap relevan dengan sistem negara-bangsa modern. Ia menekankan bahwa prinsip-prinsip dasar kepemimpinan dalam Islam terletak pada keadilan, amanah, kompetensi, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Berbeda dengan sebagian ulama klasik, Al-Qaradawi tidak lagi menjadikan keturunan Quraisy sebagai syarat mutlak kepemimpinan karena menurutnya syarat tersebut berkaitan dengan konteks historis tertentu dan tidak bersifat universal.³² Pendekatan Al-Qaradawi menunjukkan upaya reinterpretasi terhadap warisan politik Islam klasik agar tetap relevan dengan sistem politik kontemporer yang menempatkan kompetensi dan partisipasi masyarakat sebagai prinsip utama dalam proses kepemimpinan.

Telaah terhadap pemikiran para ulama menunjukkan adanya dinamika dalam interpretasi hadis-hadis kepemimpinan. Beberapa prinsip seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab tetap dipertahankan sebagai fondasi kepemimpinan, namun terdapat perbedaan dalam menentukan sumber legitimasi dan syarat ideal seorang pemimpin. Perbedaan tersebut mencerminkan proses adaptasi pemikiran politik Islam terhadap perubahan konteks sejarah dan sosial. Untuk memudahkan identifikasi titik temu maupun titik perbedaan di antara para tokoh yang dikaji, hasil klasifikasi pemikiran mereka disajikan dalam tabel berikut;

³⁰ Suharti, "Al-Siyasah Al-Syar'iyah 'Inda Ibn Taimiyah."

³¹ Yusuf Al-Qaradawi, *Min Fiqh Al-Dawlah Fi Al-Islam* (Dar Al-Shuruq, 2001).

³² Paizah Ismail, *Fiqh Al-Awlawiyyat: Konsep Dan Hubungannya Dengan Fiqh Al-Muazanat, Fiqh Al-Syar Dan Fiqh Al-Waqi'dalam Perlaksanaan Hukum Islam*, 1997, https://Knova.Um.Edu.My/Cgi/Viewcontent.Cgi?Article=2191&Context=Research_Publications_Pre2000.

Aspek	Al-Mawardi	Al-Ghazali	Ibn Taimiyah	Yusuf al-Qaradawi
Orientasi Kepemimpinan	Menjaga agama dan mengatur urusan dunia (<i>hirasat al-din wa siyasat al-dunya</i>)	Menjaga keteraturan sosial dan mencegah kekacauan (<i>fitnah</i>)	Mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan	Mewujudkan kemaslahatan publik dalam konteks negara modern
Landasan Utama Kepemimpinan	Keadilan dan legitimasi kekhalifahan	Moralitas dan etika kepemimpinan	Kompetensi (<i>al-quwwah</i>) dan amanah (<i>al-amanah</i>)	Keadilan, amanah, kompetensi, dan keberpihakan kepada rakyat
Kriteria Pemimpin Ideal	Adil, berilmu, sehat jasmani, memiliki kemampuan politik, dan berasal dari Quraisy	Adil, amanah, rendah hati, menerima nasihat ulama, sederhana	Kompeten, amanah, adil, dan mampu menjalankan tugas secara efektif	Kompeten, amanah, adil, visioner, dan berorientasi pada kemaslahatan
Posisi terhadap Nasab Quraisy	Menjadi syarat kepemimpinan	Dipertahankan sebagai syarat ideal	Tidak menjadi syarat utama	Tidak relevan sebagai syarat kepemimpinan modern
Penekanan terhadap Kompetensi	Penting, tetapi tidak dominan	Penting, namun berada di bawah kualitas moral	Sangat dominan	Sangat penting dan menjadi dasar legitimasi kepemimpinan
Penekanan terhadap Moralitas	Tinggi	Sangat tinggi	Tinggi	Tinggi
Sumber Legitimasi Kepemimpinan	Kekhalifahan dan tradisi politik Islam klasik	Otoritas moral dan kemampuan menjaga stabilitas sosial	Kemampuan dan integritas pemimpin	Kapasitas, integritas, dan penerimaan masyarakat
Konteks Historis	Masa kemunduran Abbasiyah dan fragmentasi politik	Masa melemahnya otoritas politik Islam klasik	Masa pasca-serangan Mongol dan krisis politik	Era negara-bangsa, demokrasi, dan masyarakat modern

Diskursus Kontemporer tentang Kepemimpinan

Berdasarkan analisis terhadap hadis-hadis kepemimpinan serta interpretasi para ulama dari berbagai periode, penelitian ini menemukan bahwa konsep kepemimpinan dalam Islam pada dasarnya dibangun di atas fondasi etika yang bersumber dari nilai-nilai amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kompetensi. Nilai-nilai tersebut muncul secara konsisten dalam berbagai hadis yang membahas kepemimpinan dan menjadi titik temu di antara para ulama meskipun mereka hidup dalam konteks sosial dan politik yang berbeda. Dengan demikian, hadis-hadis kepemimpinan tidak semata-mata berbicara mengenai struktur kekuasaan, tetapi lebih menekankan kualitas moral yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.

Hal ini menunjukkan bahwa orientasi utama hadis-hadis kepemimpinan bukanlah pada identitas etnis, suku, maupun faktor genealogis, melainkan pada kemampuan seseorang dalam menjalankan amanah dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Hadis tentang larangan menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, misalnya, memperlihatkan bahwa kompetensi merupakan unsur penting dalam kepemimpinan. Demikian pula hadis tentang amanah dan tanggung jawab menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan dalam Islam memiliki dimensi moral yang sangat kuat. Oleh karena itu, identitas sosial seorang pemimpin pada dasarnya berada pada posisi sekunder dibandingkan kualitas etis yang dimilikinya.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan pendekatan antara ulama klasik dan ulama kontemporer dalam memahami hadis-hadis kepemimpinan. Al-Mawardi dan Al-Ghazali, misalnya, masih mempertahankan syarat keturunan Quraisy sebagai bagian dari konstruksi kepemimpinan ideal. Pandangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks politik kekhalifahan yang masih menjadi sistem pemerintahan dominan pada masa mereka. Dalam konteks tersebut, legitimasi genealogis dipandang sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas politik dan persatuan umat Islam. Sebaliknya, Ibn Taimiyah mulai menggeser fokus pembahasan pada aspek kompetensi dan amanah, sedangkan Yusuf al-Qaradawi secara lebih tegas menempatkan kapasitas, integritas, dan kemaslahatan publik sebagai dasar legitimasi kepemimpinan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa interpretasi terhadap hadis kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh perubahan konteks sosial dan politik yang melingkupi masing-masing periode.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, penelitian ini menemukan adanya pergeseran paradigma dalam konsep legitimasi kepemimpinan Islam. Jika dalam tradisi politik klasik legitimasi kepemimpinan lebih banyak dikaitkan dengan faktor teologis dan genealogis, maka dalam pemikiran Islam kontemporer legitimasi tersebut cenderung bergeser menuju aspek etis dan fungsional. Seorang pemimpin tidak lagi dinilai berdasarkan asal-usul keturunan, melainkan berdasarkan kemampuannya mewujudkan keadilan, menjalankan amanah, serta menghadirkan

kemaslahatan bagi masyarakat. Pergeseran ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar kepemimpinan dalam hadis tetap relevan, meskipun bentuk dan konteks penerapannya mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan dalam hadis dibangun di atas seperangkat nilai etis yang menempatkan amanah, keadilan, tanggung jawab, kompetensi, dan kepedulian terhadap masyarakat sebagai fondasi utama kepemimpinan. Berbagai hadis yang membahas kepemimpinan tidak menitikberatkan pada aspek kekuasaan sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keteraturan kehidupan sosial. Dengan demikian, legitimasi kepemimpinan dalam perspektif hadis lebih banyak ditentukan oleh kualitas moral dan kapasitas seorang pemimpin daripada identitas sosial, etnis, maupun faktor-faktor genealogis semata.

Kajian terhadap pemikiran Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Yusuf al-Qaradawi menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam menempatkan keadilan, amanah, dan tanggung jawab sebagai prinsip dasar kepemimpinan, masing-masing tokoh memiliki penekanan yang berbeda sesuai dengan konteks sosial-politik yang melatarbelakanginya. Al-Mawardi dan Al-Ghazali masih mempertahankan unsur legitimasi genealogis yang berkembang dalam tradisi politik kekhalifahan, sedangkan Ibn Taimiyah dan Yusuf al-Qaradawi lebih menekankan aspek kompetensi, efektivitas pemerintahan, dan kemaslahatan publik sebagai dasar utama kepemimpinan.

Adapun diskursus mengenai kepemimpinan perempuan dan non-Muslim memperlihatkan bahwa perbedaan pandangan ulama tidak hanya bersumber dari teks hadis yang digunakan, tetapi juga dari pendekatan interpretatif yang diterapkan. Ulama klasik cenderung memahami hadis secara normatif sesuai dengan struktur sosial-politik pada zamannya, sedangkan ulama kontemporer berupaya melakukan pembacaan yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan perubahan realitas sosial dan politik masyarakat modern. penelitian ini melihat adanya pergeseran paradigma dalam memahami legitimasi kepemimpinan Islam, dari yang semula lebih menekankan aspek genealogis dan simbolik menuju legitimasi yang bertumpu pada nilai-nilai etis dan fungsional. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa substansi ajaran hadis tentang kepemimpinan tetap relevan dalam berbagai konteks zaman karena berorientasi pada terwujudnya keadilan, amanah, dan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Siti Urlan. "Khalifah, Amir Al-Mukmin, Imam, Ra'in: Tinjauan Bahasa dan Istilah dalam Pengembangan Kepemimpinan Pendidikan Islam." *Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan* 2, no. 2 (2025): 511–22. <https://doi.org/10.63424/ahsanitaqwim.v2i2.298>.
- Al-Ghazâlî, Abû Hâmid Muhammad. *Al-Tibr al-Masbûk fî-Nasîhat al-Mulûk*. Al-Mu'assasa al-Jâmi'iyya lil-Dirâsât wa-l-Nachr wa-l-Tawzî', 1987.
- Almas, Nasya Zahirah. "Amanah dalam Q.S An-Nisa Ayat 58 dan Relevansinya Terhadap Krisis Kepemimpinan di Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/79972/>.
- Almubarak, Fauzi. "Keadilan dalam Perspektif Islam." *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2018): 115–43.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Min Fiqh al-Dawlah fî al-Islam*. Dar Al-Shuruq, 2001.
- Amertha, Mohammad Fajar, dan Dedy Pradesa. "Menggali Prinsip-Prinsip Manajemen dalam Islam: Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 6, no. 1 (2024): 209–30. <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v6i1.301>.
- Batubara, Agung Arif Hakim, Cindy Salsabila Ginting, Murni Amalia, Mutiara Ramadhan Nasution, dan Syahbudin Syahbudin. "Etika Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam: Teladan Nabi sebagai Fondasi Integritas Pemimpin Modern." *EDU SOCIETY: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2025): 826–33. <https://doi.org/10.56832/edu.v5i2.1369>.
- Dozan, Wely, dan Qohar Al Basir. "Pemimpin Ideal Perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Ayat-Ayat Kepemimpinan." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist* 4, no. 1 (2021): 54–66. <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i1.102>.
- Halimi, Dwiki Nur, Mursalin Mursalin, dan Uun Yusufa. "Transformasi Nilai-Nilai Spiritual Ibnu 'Arabi dalam Kitab Al-Futūḥāt Al-Makkiyyah pada Kehidupan Kontemporer." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2026): 9513–19. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4809>.
- Hamid, Abdul, Busra Febriyarni, dan Muhammad Husein. "Konsep Ulil Amri Menurut Muhammad Quraish Shihab dan Implementasi Kepemimpinan pada Masa Sekarang." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/6588/>.
- Hasrul, Mulawardani, dan Sahrani. "Krisis Integritas Kepemimpinan: Analisis Etika Manajerial dalam Industri Perbankan Syariah Modern." *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan (Islamic Science)* 3, no. 4 (2025): 82–105. <https://doi.org/10.35905/sipakainge.v3i4.14135>.
- Ilyas, Muhammad, dan Nur Rahmah. "Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Siyasah: Urgensi, Ketaatan dan Kriteria Pemimpin." *Equality: Law and Social* 1, no. 1 (2025): 1–11.
- Ismā'îl Al-Bukhārî, Muḥammad ibn. *Ṣaḥîḥ al-Bukhārî*. Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H.
- Ismail, Paizah. *Fiqh Al-Awlawiyyat: Konsep dan Hubungannya dengan Fiqh Al-Muazanat, Fiqh Al-Syar dan Fiqh Al-Waqi'dalam Perlaksanaan Hukum Islam*. 1997. https://knova.um.edu.my/cgi/viewcontent.cgi?article=2191&context=research_publications_pre2000.
- Kurnia, Ryzka Dwi. "Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Mawardi." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 6, no. 1 (2019): 72–89.

<https://doi.org/10.32505/politica.v6i1.2728>.

- Noho, Fitrah. "Moralitas Politik dan Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Legislatif di Indonesia Pasca Pemilu 2024." *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik* 12, no. 2 (2024): 45–51. <https://doi.org/10.66475/fisip.v12i2.1196>.
- Permadi, Danang, dan Kotimah. "Konsep Pemimpin dalam Islam (Analisis Pemikiran Al-Mawardi)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 10–17.
- Saadah, Nailus, dan Umma Farida. "Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dalam Perspektif Pendidikan Islam." *TADBIRUNA* 4, no. 2 (2025): 304–18. <https://doi.org/10.51192/jurnalmanajemenpendidikanislam.v4i2.1505>.
- Siddeh, Khoirul Anam. "Keadilan dalam Perspektif Hadis: Analisis Teks Hadis Tentang Keadilan Seorang Pemimpin." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist* 4, no. 2 (2021): 174–86. <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.129>.
- Simamora, Mauizah Hasanah, Jelita Simbolon, dan Lutfi Kurmia Wildani. "Analisis Kriteria Pemimpin dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tematik Terhadap Ayat-Ayat Tentang Pemimpin Ideal." *Ibn Abbas* 7, no. 2 (2024): 208–26. <https://doi.org/10.51900/ias.v7i2.22897>.
- Suhartawan, Budi. "Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Qur'an." *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 01 (2021): 1–23. <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v2i1.45>.
- Suharti, M. "Al-Siyasah Al-Syar'iyah 'Inda Ibn Taimiyah." *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 2 (2015): 25–42.
- Tri Yugo. *Trust Leadership: 5 Pilar Kepemimpinan Profetik*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2026.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam." *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2014): 35–57.